

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Batam sebagai salah satu kota terluar dari Indonesia dan merupakan kota termaju di Provinsi Kepulauan Riau, Batam terletak di lokasi strategis yang sangat menguntungkan yaitu terletak di jalur lalu lintas perdagangan internasional dengan negara Singapura dan Malaysia sebagai tetangga, serta relatif aman dari terjadinya kerusakan alam karena letaknya diluar kawasan *ring of fire*, membuat Kota Batam menjadi wilayah yang memiliki *zero risk* untuk terkena bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami. Djalankan dengan dua jenis pemerintahan dengan tugas berbeda yaitu Pemerintah Kota Batam memiliki kewenangan membidangi pemerintah dalam kearsipan dan kemasyarakatan maupun sosial, sedangkan Badan Pengusahaan Batam bertugas dalam mengatur tata kelola lahan serta investasi di wilayah *Free Trade Zone* (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diseluruh Batam. Peraturan tersebut menjadikan Kota Batam sebagai salah satu tujuan utama investor asing untuk menanamkan modalnya.

Kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diperkirakan akan mendorong semakin banyak orang Singapura dan Malaysia yang berminat berinvestasi di Batam, selain tentunya masyarakat Indonesia (Tipa & Purba, 2019). Dalam melakukan tugasnya dan kewenangannya menjalankan administrasi lahan dan investasi di Kota Batam lembaga/ instansi BP Batam (Badan Pengusahaan Batam) berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun

2007. Peraturan Pemerintah tersebut berisi kewajiban dan hak penuh BP Batam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan sumber daya alam dikawasan Batam sehubungan dengan visi dan misi kawasan Kota Batam. BP Batam melaksanakan tugas dari pemerintah sebagai perpanjangan tangan di kota Batam dengan mengatur perizinan investasi yang berada dikota Batam. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat BP Batam juga diberikan keistimewaan dalam hal penguasaan aset pemerintah pusat yang terdaftar di Kementerian Keuangan diantaranya seperti Bandar Udara Internasional, beberapa pelabuhan domestik maupun internasional, serta aset-aset lainnya seperti sarana transportasi dan Badan Usaha Rumah Sakit.

Tabel 1.1 Daftar Aset yang Dimilik BP Batam

Berpotensi Menghasilkan	Aset Non-profit	Telah Menghasilkan	Kerjasama Operasional (KSO)
Lapangan Bola Sei Harapan	Jalan	Asrama Haji	Pelabuhan Batam Center
Gedung Beringin	Mess	<i>Sport hall</i> Temenggung A.J	Pelabuhan Internasional Sekupang
Balai Latihan Kerja	Gudang Simpang Patam	Rusun Batu Ampar	Pelabuhan Roro Sekupang
Gedung Industri PCI	Angkutan	Rusun Sekupang	Pelabuhan Kabil Citranusa
<i>Ex</i> Gedung KPU	Gudang Logistik	Bandara Hang Nadim	Pelabuhan Harbour Bay
Agribisnis	<i>Record Center</i>	Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	Perusahaan Air Minum (Dam)
Gedung Pikori Pendidikan	Rumah Potong Temiang	Kuningan <i>Guest House</i>	
Kawasan <i>Joging Track</i>	Bengkel	Gedung <i>Guest House</i>	

Waduk	Bengkel	Kawasan Wisata Galang	
Palabuhan Sijantung	Mesjid Baitul Makmur Bk. Senyum		
Gedung SPC	Rumah Dinas		
Gedung Serbaguna SQ II			
Kantor OB Lama			
Gedung Karantina (Bea Cukai)			
Asrama Politeknik Batam			
Lapangan Bola A.J			

Sebagai salah satu aset yang berada dibawah pengawasan BP Batam, Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam merupakan Rumah Sakit Pemerintah pertama di Batam, Kepulauan Riau yang berdiri sejak tahun 1971. Yang terletak di jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang, Batam. Dalam perkembangannya Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam bermula dari klinik kesehatan yang dikelola oleh PT. Pertamina yang ketika awal didirikannya pelayanan kesehatan dikhususkan pada pegawai. Bersama berjalannya waktu, kegiatan operasional rumah sakit semakin berkembang luas hingga kekhlayak umum, dan pegawai instansi serta konsorsium pekerja industri yang ada di Pulau Batam. Sebelumnya RSBP Batam ini bernama RS Otorita Batam kemudian berubah nama menjadi Badan Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP Batam) menurut penggantian nama instansi yang mengaunginya.

Badan Usaha RSBP Batam, kini mempunyai layanan Poliklinik Penyakit Dalam, Kandungan, Anak, Bedah, Mata, THT, Jantung, Pembuluh Darah, Anastesi, Paru, Kulit Kelamin, Gigi dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai

dengan keperluan masyarakat luas dan pegawai BP Batam serta badan usaha serta industri yang ada di Batam. Selain itu Badan Usaha Rumah sakit BP Batam memiliki berbagai infrastruktur serta fasilitas kesehatan yang ditunjang dengan berbagai alat kesehatan yang tercatat sebagai aset milik RSBP Batam. Semua aset tersebut tercatat dalam neraca laporan keuangan milik RSBP Batam. Sama halnya dengan perusahaan rumah sakit juga diharuskan untuk dapat menyelenggarakan seluruh kegiatan akuntansinya berlandaskan standar pencatatan akuntansi yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh laporan keuangan yang baik.

Laporan keuangan ialah suatu kegiatan pemaparan berurut dari posisi keuangan dan kemampuan kerja sebuah instansi. Sasaran utama laporan keuangan ialah memberikan penerangan perihal posisi keuangan, kapabilitas keuangan, dan arus kas yang digunakan sebagai acuan oleh para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan penentuan pemanfaatan keuangan, SDA, SDM serta waktu bagi instansi atau entitas. Laporan keuangan juga memberi informasi akuntansi seperti informasi operasi yang berhubungan dengan pengeluaran (pembelian barang yang diperlukan, pengajian karyawan, sistem penjualan, dan lain sebagainya), informasi manajemen keuangan (bagaimana pelaku usaha merencanakan dan mengendalikan usaha) serta informasi keuangan yang mengandung neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (Purba & Khadijah, 2020). Menurut Diana & setiawati, (2017) untuk mencapai tujuan dari sebuah laporan keuangan, informasi tersebut harus menyajikan data mengenai instansi berupa Aset,

Liabilitas, Ekuitas, Pendapatan, dan tanggung jawab terhitung juga dengan profit dan defisit yang diperoleh, keikutsertaan dari dan penyaluran oleh pemilik sesuai dengan kapasitasnya sebagai *owner*. Pada proses pembuatan laporan keuangan instansi atau entitas aset yang dimiliki oleh instansi atau entitas merupakan satu dari sekian bagian yang wajib diperhatikan.

Ikatan Akuntansi Indonesia ((IAI), 2017), menjabarkan aset sebagai sumber daya yang dikelola sebuah instansi atau entitas tertentu sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan pada periode dahulu serta dapat mendatangkan profit untuk instansi atau entitas pada periode mendatang yang diharapkan dapat memajukan perusahaan. Aset merupakan bagian fundamental baik untuk usaha kecil hingga badan usaha yang kapasitasnya besar. Pada umumnya aset kelompokan menjadi 2 (dua) golongan berupa aset lancar dan aset tidak lancar, kemudian aset tidak lancar digolongkan lagi kedalam 3 (tiga) jenis yaitu aset tetap berwujud, aset tetap tidak berwujud, serta investasi jangka panjang. Pada perjalanannya aset tetap sangat penting dalam kegiatan operasional serta besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu aset tetap, karena hal itu diperlukan penerapan-penerapan akuntansi aset tetap yang tepat untuk setiap aset tetap yang terdaftar. Penerapan-penerapan aset tetap yang diperlukan meliputi pengindikasian aset tetap hingga penyajian aset kedalam laporan keuangan sebagai sebuah sajian data bagi golongan-golongan yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

Indonesia memiliki standar akuntansi yang digunakan untuk mengataur pencatatan aset yang dimiliki perusahaan, entitas atau instansi dalam upaya

mengurangi terjadinya *fraud* (kecurangan) dan penyelewengan aset dalam penerapan akuntansi aset tetap dalam perusahaan dan instansi yang mengacu pada IFRS yaitu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 (efektif per 1 Januari 2017) yang menyatakan aktiva/aset tetap merupakan kekayaan yang dikuasai sebuah instansi atau entitas baik memiliki bukti fisik ataupun tidak, dimiliki untuk difungsikan untuk aktivitas produksi serta penghasilan barang/jasa, hingga disewakan/direntalkan kepada entitas lain, atau bertujuan untuk penyelenggara kebijakan instansi atau entitas dan tidak dijual kembali. PSAK No. 16 juga mengatur proses pendataan terhadap aset tetap meliputi pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, pengeluaran, serta pengungkapan aset tetap yang dimiliki instansi atau entitas. PSAK merupakan standar yang digunakan instansi atau entitas dalam membuat laporan keuangan. PSAK No. 16 mengatur proses pendataan aset tetap menjadi 3 (tiga) fase yaitu, fase perolehan aset, fase pemakaian aset, dan fase penghentian pemakaian aset.

Dimasa pandemic covid-19, pimpinan berbagai perusahaan dan institusi menilai kejadian *fraud* dan penyelewengan aset semakin meningkat, ditengah upaya mereka mempertahankan keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan RSM Indonesia dengan melibatkan responden yang bertugas dalam menangani manajemen risiko perusahaan dari 18 sektor industri diperoleh informasi persentase penyelewengan terbesar berasal dari sektor pemerintahan (21%), ditempat kedua berasal dari sektor perbankan (15%), lalu disusul dari sektor komersial dan jasa profesional (9%). Standar Akuntansi aset tetap memberi pengaruh besar dalam kewajaran

laporan keuangan, kekeliruan pada saat memperkirakan aset tetap bisa menimbulkan kekeliruan material yang relatif besar hal ini disebabkan oleh nominal investasi yang menjadi modal untuk aset tetap cukup besar memikirkan sangat bergunanya akuntansi aset tetap pada proses pembuatan laporan keuangan. Oleh karena hal itu perlakuannya harus dialaskan pada standar akuntansi keuangan yakni PSAK No. 16 sehingga tidak terjadi ketidak sesuaian dalam pembuatan laporan keuangan. Berdasarkan penjabaran latar belakang yang disampaikan, peneliti berniat melakukan penelitian lebih jauh tentang praktik PSAK No.16 dalam pencatatan aset tetap milik perusahaan pada laporan keuangan. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “Analisis Penerapan PSAK No.16 Terhadap Perlakuan Asset Tetap Pada BP Batam”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut berikut identifikasi masalah yang penulis ajukan:

1. BP Batam memiliki berbagai jenis aset yang tersebar diseluruh Kota Batam dengan nominal harga yang relatif besar, serta mempunyai peran pokok masing-masing dalam menunjang kegiatan investasi dan operasional bagi instansi BP Batam maupun perusahaan swasta salah satunya RSBP Batam.
2. Pentingnya suatu aset tetap bagi instansi pemerintah maupun perusahaan swasta dalam melakukan kegiatan investasi dan oprasional, maka diperlukan pencatatan aset tetap secara tepat.
3. Agar terlepas dari kekeliruan yang mungkin timbul dalam pengaturan aset tetap yang dimiliki perusahaan perlu dilandaskan pencatatan yang tepat.

Karena dampak dari kekeliruan nilai aset tetap umumnya akan relatif mempengaruhi nilai investasi yang ditanamkan.

1.3 Batasan Masalah

Agar penulis dapat lebih memusatkan penelitian dan tidak melenceng dari pembahasan yang diinginkan, dalam skripsi ini penulis membatasinya pada lingkup cangkup penelitian sebagai berikut:

1. Entitas yang diteliti, penulis akan meneliti pencatatan aset tetap BP Batam yang terdaftar di RS BP Batam khususnya tanah, bangunan, kendaraan, dan alat-alat inventaris.
2. Penerapan, pada pembahasan ini penulis akan meneliti bagaimana penerapan perlakuan akuntansi diawali dari proses perolehan, pengukuran, penyusutan, dan penyajian terhadap aset tetap yang dimiliki RS BP Batam.
3. Metode penyusutan yang digunakan, dipenelitian ini penulis akan meneliti tentang metode penyusutan serta alasan penggunaan metode penyusutan aset tetap yang dimiliki RS BP Batam. Umumnya menentukan metode penyusutan yang tepat sebagai pedoman dan untuk perbandingan untuk memperoleh data yang tepat dalam pengambilan keputusan.

1.4 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan dan penyajian aset tetap pada laporan keuangan RS BP Batam ?

2. Apakah perolehan, pengakuan, pengukuran, pencatatan penyusutan dan penyajian pada aset tetap berwujud yang dimiliki RS BP Batam sesuai dengan standar pencatatan aset menurut PSAK No. 16?
3. Bagaimana implementasi PSAK No. 16 terhadap perolehan, pengakuan, pengukuran, penyusutan dan penyajian pada aset tetap yang dimiliki RS BP Batam ?

1.5 Tujuan Penelitian

Selaras dengan isi perumusan masalah maka tujuan yang ingin penulis sampaikan pada penelitian ini yaitu:

1. Memahami penyajian dan penerapan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan RS BP Batam.
2. Untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap berwujud yang dimiliki RS BP Batam dengan PSAK No.16
3. Menganalisis implementasi perlakuan PSAK No. 16 terhadap aset tetap yang terdaftar sebagai milik RS BP Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Bersumber pada hasil penelitian mengenai Penerapan Standar Akuntansi Keuangan tentang proses perolehan, pengukuran, penyusutan dan penyajian pada aset tetap milik BP Batam yang tercatat di laporan keuangan RS BP Batam manfaat yang diharapkan akan didapat antara lain:

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini bertujuan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya dibidang akuntansi dan penerapan PSAK 16 pada entitas tertentu atau perorangan.
- b. Hasil dari penelitian ini ditujukan agar dapat berfungsi untuk meningkatkan dan memperluas ilmu pengetahuan dibidang akuntansi.
- c. Penelitian ini hendaknya menjadi salah satu rujukan praktik penerapan PSAK bagi lembaga/instansi terkait, perusahaan swasta dan pelaku usaha perorangan yang ada di Kota Batam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran ketika berhadapan langsung dengan dunia kerja agar membantu serta mengetahui perbedaan diantara teori yang diperoleh dengan situasi yang sesungguhnya terjadi di lingkungan kerja.
- b. Bagi Lembaga Pendidikan, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu kajian bahan perkuliahan berhubungan dengan kesesuaian penerapan pencatatan aset tetap perusahaan dengan Pernyataan Standar Keuangan (PSAK).
- c. Bagi BP Batam, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan berkenaan dengan perlakuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 terhadap aset milik BP Batam yang tercatat di Laporan Keuangan milik RSBP Batam.